

# ANALISIS POTENSI EKONOMI DENGAN PENENTUAN SEKTOR BASIS ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

*(The Economic Potential Analysis by Determining Basic Sector Among Regions in Central Sulawesi Province)*

**Ridwan**

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palu

**Any Suryantini, Irham**

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada

## **ABSTRACT**

*The objectives of this research are: (1) analyzing and classifying economic sectors into basic and non basic sector among districts in Central Sulawesi Province; (2) understanding characteristics of economic growth among its districts; (3) understanding the role of national and regional share among its districts. The analyses used are Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Klassen typology, and mix and share analysis. LQ analysis result show that basic sector in Central Sulawesi are agricultural sector, electricity and water supply sector, construction sector, communication and transportation sector, and services sector. LQ analysis, at sub-district level generating agricultural sector is the basic sector for Banggai Kepulauan, Banggai, Morowali, Poso, Donggala, Tolitoli, Buol, and Parimo districts. Services sector is the basic sector for Palu, Donggala, and Tojo Una Una districts. The DLQ analysis indicating that agricultural sector still expected as basic sector in the future for some districts in Central Sulawesi Province. The Klassen typolgy analysis show that Morowali district is categorized as developed and fast growing region; Banggai Kepulauan, Banggai, Tolitoli, and Buol districts are categorized as growing regions; Parimo and Palu districts are categorized as growing but under-pressured; while Poso, Donggala, and Tojo Una Una districts are categorized as less developed. The mix and share analysis shows that the regional share of 10 districts are more prominent determinant factor than national share.*

**Keywords:** *basic sector, economic growth, Location Quotient, mix and share analysis*

## **PENDAHULUAN**

Manajemen pengelolaan ekonomi nasional yang berorientasi pertumbuhan dan terkonsentrasi pada sektor tertentu atau pada wilayah tertentu, ternyata gagal mewujudkan pemerataan pendapatan karena

mengabaikan penguatan ekonomi daerah. Ketidakmerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar daerah menjadi penyebab kegagalan pembangunan ekonomi nasional, karena itu perlu perubahan visi perencanaan pembangunan. Pemerintah pusat dalam mengemban amanat akselerasi pembangunan nasional hendaknya berbasis pada penataan dan pengelolaan sumber daya lokal daerah agar aktifitas perekonomian termasuk di dalamnya insentif modal, pembangunan infrastruktur, adopsi teknologi dan pengembangan kapasitas masyarakat harus diarahkan kepada daerah-daerah berdasarkan pada potensi lokalitasnya masing-masing.

Penguatan dan perluasan sektor basis di setiap daerah menjadi strategis untuk menjawab berbagai permasalahan ekonomi dan sosial di daerah khususnya daerah-daerah terkategori tertinggal dan terbelakang dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan perkapita. Secara teoritik, diduga bahwa ketidakmampuan daerah untuk berkembang dan maju setara dengan daerah lainnya karena tidak ditemukannya sektor basis sebagai sektor penggerak utama perekonomian yang memiliki dampak ganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap sektor lainnya. Pengidentifikasian sektor basis beserta penanganannya perlu menjadi prioritas utama dalam perencanaan ekonomi kewilayahan.

Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Indonesia bagian timur, yang pertumbuhan ekonominya relatif stabil, pembangunan dan pengembangan sektor basis juga tumbuh mengikuti dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat setempat, aktifitas perekonomian mulai tumbuh dengan baik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 mencapai 7,35%; mengalami peningkatan dibanding tahun 2004 sebesar 7,15%.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa perkembangan berbagai sektor ekonomi selama tahun 2005 mengalami peningkatan. Hal ini harus menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan ekonomi agar sektor-sektor potensial yang diproyeksi menjadi sektor basis diapresiasi dengan berbagai insentif kebijakan sehingga dapat secara efektif menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor dan penguatan ekonomi.

Perencanaan pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis pada penentuan sektor basis harus didukung informasi tentang karakteristik pertumbuhan ekonomi disetiap daerah kabupaten serta pengaruh pertumbuhan ekonomi antar daerah (kedudukan *national share* dan *regional share*). Informasi yang valid terkait tiga komponen di atas dapat mempertajam analisis untuk mengamati perubahan struktur ekonomi, struktur ruang sebagai akibat dari perencanaan sektor.

Berdasarkan pokok pikiran di atas maka diperlukan analisis tentang sektor ekonomi yang menjadi sektor basis antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, karakteristik pertumbuhan ekonomi antar daerah serta kedudukan *national share* dan *regional share* antar daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

## METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi mengenai subjek yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan periode data yang diamati dari tahun 2002 sampai dengan 2006. Data utama dan penunjang dikumpulkan dari instansi terkait, yaitu: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah. Data tersebut diolah dengan pendekatan:

### a. Analisis Location Quotient (LQ)

Penggunaan pendekatan *Location Quotient* (LQ) dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini memiliki dua keunggulan penting:

1. LQ memperhitungkan ekspor tidak langsung dan ekspor langsung.
2. Metode ini tidak mahal dan dapat diterapkan kepada data historis untuk mengetahui *trend*. Metode ini juga mengandung kelemahan-kelemahan karena didasarkan pada asumsi bahwa produktifitas rata-rata dan konsumsi rata-rata antar wilayah adalah sama, namun kelemahan-kelemahan ini tidak terlalu ditonjolkan karena selain dari dua keunggulan di atas, metode LQ dapat menghasilkan suatu taksiran terhadap kegiatan basis.

Pendekatan LQ ini digunakan untuk mengetahui sektor basis dan bukan basis dalam perekonomian antar daerah di Sulawesi Tengah. Model persamaan matematika sebagai berikut:

$$LQ = \frac{PDRBik/TPDRBk}{PDRBip/TPDRBp}$$

Keterangan:

PDRBik = PDRB sektor i di kota/kabupaten

TPDRBk = total PDRB di kota/kabupaten

PDRBip = PDRB sektor i di provinsi

TPDRBp = total PDRB di provinsi

Petunjuk yang sering digunakan dalam menginterpretasi LQ adalah cara penginterpretasian yang dikemukakan Bendavid-Val (1991) sebagai berikut:

1. Jika nilai  $LQ > 1$ , kemampuan kontribusi sektor/subsektor terhadap PDRB lebih besar dibandingkan kemampuan rata-rata sektor/subsektor sejenis di wilayah referensi, sehingga merupakan sektor/subsektor basis.

2. Jika nilai  $LQ = 1$ , kemampuan kontribusi sektor/subsektor tersebut terhadap PDRB sama dengan rata-rata kemampuan sektor/subsektor sejenis di wilayah referensi, sehingga hanya dapat mencukupi kebutuhan di dalam daerah sendiri.
3. Jika nilai  $LQ < 1$ , kemampuan kontribusi sektor/subsektor lebih kecil dibanding kemampuan rata-rata wilayah referensi sehingga bukan merupakan sektor basis.

#### b. Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Menurut Suyatno (2000), untuk mengatasi kelemahan metode LQ yang bersifat statis, hanya memberi gambaran pada waktu tertentu saja, maka digunakan varian dari LQ, yaitu *Dinamic location Quotient* (DLQ) sehingga dapat diketahui perubahan atau reposisi sektoral, dengan formulasi sebagai berikut:

$$DLQ = \frac{[(1 + g_{ij})/(1 + g_j)]^t}{[(1 + G_{in})/(1 + G_n)]^t}$$

Keterangan :

DLQ= indeks *dynamic location quotient*

$g_{ij}$  = rata-rata laju pertumbuhan sektor i di daerah kabupaten/kota

$g_j$  = rata-rata laju pertumbuhan di daerah kabupaten/kota

$G_{in}$  = rata-rata laju pertumbuhan sektor i di daerah Provinsi Sulawesi Tengah

$G_n$  = rata-rata laju pertumbuhan di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah

$t$  = kurun waktu analisis

Kriteria :

1.  $DLQ > 1$ , sektor i masih dapat diharapkan untuk menjadi basis di masa yang akan datang.
2.  $DLQ < 1$ , sektor ke i tidak dapat diharapkan untuk menjadi basis di masa yang akan datang.

#### c. Analisis *Klassen Typology*

Untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, maka digunakan *Analysis Klassen Typology*. Cara kerja analisis ini adalah menghitung perbandingan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita masing-masing daerah kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Tengah. Secara matematik dirumuskan persamaan sebagai berikut:

$$r_j = \text{rata-rata laju pertumbuhan region (kabupaten/kota)}$$

$$= \frac{V_{jt} - V_{jo}}{V_{jo}} \times 100\%$$

$$r_n = \text{rata-rata laju pertumbuhan nasional (wilayah provinsi)}$$

$$= \frac{V_{nt} - V_{no}}{V_{no}} \times 100\%$$

$$Y_j = \text{rata-rata pendapatan region (kabupaten/kota)} = \frac{V_j}{P_j}$$

$$Y_n = \text{rata-rata pendapatan nasional (wilayah provinsi)} = \frac{V_n}{P_n}$$

Keterangan:

$V_{jo}$  = PDRB daerah kabupaten/kota tahun awal

$V_{jt}$  = PDRB daerah kabupaten/kota pada tahun akhir

$V_{no}$  = PDRB Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun awal

$V_{nt}$  = PDRB Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir tahun

$Y_j$  = pendapatan perkapita kabupaten/kota

$Y_n$  = pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Tengah

$P_j$  = jumlah penduduk daerah kabupaten/kota dihitung pada pertengahan tahun

$P_n$  = jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dihitung pada pertengahan tahun

Berdasarkan *analysis klassen typology*, karakteristik pertumbuhan daerah terkategori sebagai berikut:

1. Daerah maju dan tumbuh cepat, apabila ( $r_j > r_n$  dan  $Y_j > Y_n$ )
2. Daerah maju tapi tertekan, apabila ( $r_j < r_n$  dan  $Y_j < Y_n$ )
3. Daerah yang sedang tumbuh, apabila ( $r_j > r_n$  dan  $Y_j < Y_n$ )
4. Daerah yang relatif tertinggal, apabila ( $r_j < r_n$  dan  $Y_j < Y_n$ )

#### d. Analisis Mix and Share

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kedudukan *regional share* dan *national share* dalam menentukan pertumbuhan ekonomi antar daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Analisis tersebut diarahkan pada penentuan pertumbuhan ekonomi setiap daerah, ditentukan oleh *regional share* atau *national share*. Pendekatan tersebut menggunakan persamaan matematik sebagai berikut:

$$R_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + S_{ij}$$

Keterangan :

$R_{ij}$  = perubahan pertumbuhan sektor i di daerah j

$N_{ij}$  = pertumbuhan ekonomi nasional sektor i di daerah j ( $N_{ij} = V_{ij} \cdot r_n$ )

## AGRO EKONOMI

$M_{ij}$  = pertumbuhan bauran sektor i di daerah j ( $M_{ij} = V_{ij}(r_{in} - r_n)$ )

$S_{ij}$  = pertumbuhan pangsa wilayah (*share*) sektor i di daerah j  
( $S_{ij} = V_{ij}(r_{ij} - r_{in})$ )

$R_{ij} = V^*_{ij} - V_{ij}$

Dimana :

$V^*_{ij}$  = PDRB sektor i di daerah kabupaten/kota pada akhir tahun penelitian

$V_{ij}$  = PDRB sektor i di daerah kabupaten/kota pada awal penelitian

$r_{ij}$  = pertumbuhan PDRB sektor i di daerah kabupaten/kota

$r_{in}$  = pertumbuhan PDRB sektor i di tingkat provinsi

$r_n$  = pertumbuhan PDRB provinsi

Untuk mengetahui secara umum tentang kedudukan *regional share* dan *national share* dalam menentukan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah, digunakan kriteria sebagai berikut:

1. Bila  $N_{ij} < M_{ij} + S_{ij}$ , maka faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan *regional share*nya.
2. Bila  $N_{ij} > M_{ij} + S_{ij}$ , maka faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan *national share*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan sepuluh kabupaten/kota menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang kontribusinya paling besar mempengaruhi perkembangan ekonomi di sembilan kabupaten, dengan kontribusi rata-rata di atas 50%, disusul sektor perdagangan restoran dan hotel serta sektor jasa-jasa yang kontribusinya besar di sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Data kontribusi dari 9 sektor menunjukkan bahwa sembilan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan sektor pertanian sebagai sektor andalan, baik dalam peningkatan pendapatan maupun dalam upaya penyerapan tenaga kerja. Atas andil tersebut perlu suatu kebijakan perencanaan regional yang berbasis pada pengembangan sektor pertanian agar supaya besarnya kontribusi sektor pertanian dapat memberi nilai tambah terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan di Sulawesi Tengah. Kontribusi sektor ekonomi per kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi Sektor Ekonomi per Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2002-2006, ADHK 2000

Kontribusi Sektor Ekonomi Per Kabupaten dan Kota Di Sulawesi Tengah										
No	Banggai Kepulauan	Banggai	Moro-wali	Poso	Donggal	Tolitoli	Buol	Parimo	Tojo Una-Una	Kota Palu
1.	51,790	54,655	58,322	45,105	49,549	50,998	55,605	58,016	42,229	2,967
2.	0,619	1,103	3,073	0,884	2,898	1,628	0,948	1,244	1,390	4,260
3.	4,648	7,549	4,014	9,333	4,097	8,039	8,623	5,837	11,554	13,718
4.	0,570	0,459	0,447	0,632	0,282	0,490	0,568	0,113	1,427	2,264
5.	1,025	5,933	3,325	2,330	7,507	5,369	5,467	5,385	5,943	9,719
6.	20,564	9,048	14,407	15,113	12,562	9,861	11,710	12,660	13,359	13,145
7.	6,262	4,474	0,986	8,848	5,486	6,506	3,506	7,772	2,259	12,086
8.	4,392	4,368	4,170	3,287	1,843	3,987	3,454	0,587	4,742	12,420
9.	10,130	12,412	11,256	14,468	15,776	13,123	10,118	8,387	17,097	29,422

Sumber : BPS (diolah), 2002-2006

Keterangan:

- |  |  |
|--|--|
| 1 = sektor pertanian                   | 6 = sektor perdagangan restoran dan hotel          |
| 2 = sektor pertambangan dan penggalian | 7 = sektor pengangkutan dan komunikasi             |
| 3 = sektor industri pengolahan         | 8 = sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan |
| 4 = sektor listrik dan air bersih      | 9 = sektor jasa-jasa                               |
| 5 = sektor bangunan                    |  |

Kota Palu merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak menjadikan sektor pertanian sebagai sektor andalan (*leading sector*). Hal tersebut dapat dilihat pada data kontribusi sektor, dimana kontribusi sektor pertanian sangat kecil terhadap pembentukan PDRB Kota Palu.

Kota Palu sebagai kota provinsi dengan orientasi pengembangan ekonomi pada sektor sekunder dan tersier, cukup sesuai dan relevan dengan besarnya kontribusi sektor jasa, industri pengolahan, perdagangan restoran dan hotel serta pengangkutan dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur ekonomi yang berorientasi pada sektor jasa, karena Kota Palu diharapkan sebagai pusat kegiatan ekonomi (*aglomerasi ekonomi*) untuk menampung kegiatan ekonomi daerah di luarnya yang terkonsentrasi pada sektor penghasil barang dan jasa.

### 1. Analisis Sektor Basis Antar Daerah di Sulawesi Tengah

Analisis sektor ekonomi antar daerah di Sulawesi Tengah, terlihat ada korelasi atau hubungan yang erat antara kontribusi sektor dengan kebasisan sektor di setiap daerah kabupaten dan kota. Sektor pertanian yang kontribusinya besar di sembilan kabupaten, diantaranya delapan daerah kabupaten menjadikan sektor pertanian sebagai sektor basis, kecuali Kabupaten Tojo Una-Una dan Kota Palu. Sementara, sektor perdagangan restoran dan hotel menjadi sektor basis di lima daerah kabupaten dan kota.

## AGRO EKONOMI

Sektor jasa-jasa menjadi sektor basis di tiga kabupaten. Sektor pengolahan yang urutan keempat kontribusinya di beberapa daerah kabupaten, juga terlihat menjadi sektor basis di enam daerah kabupaten dan kota. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor basis di tiga kabupaten dan kota.

Sektor listrik dan air bersih menjadi sektor basis di dua daerah kabupaten. Sektor bangunan menjadi sektor basis di Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi sektor basis di tiga kabupaten dan kota. Sedangkan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menjadi sektor basis di Kabupaten Tojo Una-Una dan Kota Palu. Data sektor basis per kabupaten dan kota berdasarkan koefisien LQ di Provinsi Sulawesi Tengah terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sektor Basis per Kabupaten dan Kota Berdasarkan Koefisien LQ di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2002 dan 2006, ADHK 2000

<b>Koefisien <i>Location Quotient</i> (LQ) Sektor Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah pada tahun 2002 dan 2006</b>											
<b>Kabupaten/sektor</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
Banggai Kepulauan	LQ	2002	1,182				1,570		1,001		
		2006	1,142				1,691				
Banggai	LQ	2002	1,192	1,035		1,008			1,020		
		2006	1,250	1,144							
Morowali	LQ	2002	1,328				1,148				
		2006	1,227	3,729			1,090				
Poso	LQ	2002	1,015	1,290			1,100	1,375		1,000	
		2006	1,004	1,404			1,287	1,275		0,933	
Donggala	LQ	2002	1,130	1,561		1,156				1,008	
		2006	1,097	1,121		1,171				1,060	
Tolitoli	LQ	2002	1,117	1,094							
		2006	1,161	1,220							
Buol	LQ	2002	1,212	1,216			1,000				
		2006	1,283	1,266							
Parimo	LQ	2002	1,288				1,000	1,229			
		2006	1,305				1,000	1,111			
Tojo Una-Una	LQ	2002		1,654	1,946		1,026		1,085	1,134	
		2006		1,655	1,870		1,033		1,055	1,137	
Kota Palu	LQ	2002		2,213	1,823	2,984	1,569	1,043	1,827	2,799	1,930
		2006		1,708	2,093	3,006	1,437	1,038	1,816	2,782	1,941

Sumber : BPS (diolah), 2002-2006

Keterangan:

- |  |  |
|--|--|
| 1 = sektor pertanian                   | 6 = sektor perdagangan restoran dan hotel          |
| 2 = sektor pertambangan dan penggalian | 7 = sektor pengangkutan dan komunikasi             |
| 3 = sektor industri pengolahan         | 8 = sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan |
| 4 = sektor listrik dan air bersih      | 9 = sektor jasa-jasa                               |
| 5 = sektor bangunan                    |  |



Berdasarkan hasil analisis LQ, terlihat ada beberapa sektor pada daerah kabupaten tertentu mengalami fluktuasi kebasisan atau reposisi sektor, dimana pada tahun tertentu sektor tersebut masih menjadi sektor basis namun pada tahun berikutnya sektor tersebut tidak lagi menjadi sektor basis (non basis).

Perubahan kebasisan atau reposisi sektor dari non basis menjadi basis atau sebaliknya dari basis menjadi non basis sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan sektor pada masing-masing daerah yang berakibat pada perubahan komposisi kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB daerah kabupaten dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Pada daerah tertentu dimana sektor yang kontribusinya besar dan bertahan sebagai sektor basis, maka daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang mempunyai perencanaan sektor yang baik karena dapat memacu pertumbuhan sektor yang diharapkan dapat berdampak ganda pada sektor lain.

Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) dilakukan sebagai sarana analisis untuk menyempurnakan berbagai kelemahan metode analisis LQ yang cenderung statis, maka analisis DLQ digunakan untuk mengetahui proyeksi setiap sektor, apakah tetap menjadi sektor basis dimasa yang akan datang atau tidak. Berdasarkan analisis DLQ, diketahui bahwa beberapa sektor di daerah kabupaten/kota pada periode analisis (2002-2006) menjadi sektor basis tetapi tidak bisa diharapkan sebagai sektor basis di masa yang akan datang. Hal tersebut disebabkan karena nilai DLQ kurang dari satu, begitupun beberapa sektor yang lain, terlihat tidak menjadi sektor basis pada periode analisis tetapi diproyeksikan menjadi sektor basis di masa yang akan datang karena nilai DLQ lebih besar dari satu.

Secara umum, berdasarkan analisis DLQ, terlihat dua sektor ekonomi (sektor pertanian dan sektor industri pengolahan) menjadi sektor basis di sebagian besar kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak signifikan mengalami reposisi sektor. Kedua sektor tersebut tetap konsisten sebagai sektor basis di beberapa daerah kabupaten yang saat ini menjadi sektor basis maupun di masa yang akan datang karena kemampuan sektor tersebut mempertahankan volume produksi. Akibatnya kedua sektor tersebut pertumbuhannya cukup stabil dan lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Hasil analisis DLQ per kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis DLQ per Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2002-2006, ADHK 2000

Analisis DLQ per Sektor pada Setiap Kabupaten dan Kota di Sulawesi tengah										
No	Banggai Kepulauan	Bang- gai	Moro- wali	Poso	Dongga- la	Tolitoli	Buol	Parimo	Tojo Una- Una	Kota palu
1.		1,797		1,000		1,654	2,037	1,180		1,685
2.			16.900							
3.	9,024	5,829	2,408	4,330	11,989	6,525	2,149	3,515		9,800
4.	2,042	1,399								1,117
5.	1,213				1,173	1,063		1,451		
6.	2,282			5,870	1,311			1,011	1,142	1,000
7.	1,035				1,220	1,003				1,002
8.					1,994			1,398		1,000
9.	1,366				1,881			1,249	1,032	1,076

Sumber : BPS (diolah), 2002-2006

Keterangan:

- 1 = sektor pertanian
- 2 = sektor pertambangan dan penggalian
- 3 = sektor industri pengolahan
- 4 = sektor listrik dan air bersih
- 5 = sektor bangunan
- 6 = sektor perdagangan restoran dan hotel
- 7 = sektor pengangkutan dan komunikasi
- 8 = sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- 9 = sektor jasa-jasa

Penguatan dan perluasan sektor basis di setiap daerah sangat penting untuk menggerakkan perekonomian daerah, karena besarnya basis dalam suatu daerah akan menambah permintaan barang dan jasa dari luar daerah tersebut yang berakibat pada penambahan devisa daerah. Sesuai dengan teori pertumbuhan jalur cepat (*turnpike*), bahwa setiap negara/wilayah perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor tersebut memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar.

Hasil analisis LQ dan DLQ menunjukkan bahwa sektor yang kontribusinya besar dan menjadi sektor basis di setiap daerah kabupaten tidak bersifat statis, tetapi mengalami perubahan perkembangan atau reposisi sektor (basis dan non basis) sesuai laju pertumbuhan sektor. Sektor yang kecenderungan pertumbuhannya stabil dan lebih tinggi dari sektor yang sama pada tingkat provinsi, maka sektor tersebut diproyeksikan tetap menjadi sektor basis di masa yang akan datang. Untuk menjaga

kesinambungan pembangunan daerah maka pertumbuhan sektor basis perlu mendapat perhatian kebijakan agar sektor basis yang saat ini memberi kontribusi besar dan dapat diharapkan memberi kontribusi yang sama atau lebih besar di masa yang akan datang.

## 2. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah di Sulawesi Tengah

Kesesuaian antara sektor basis dengan perencanaan ekonomi daerah sebagai ruang dapat diamati dan dievaluasi berdasarkan karakteristik pertumbuhan ekonomi suatu daerah, apakah sektor basis di daerah tersebut dapat menjadi sektor penggerak utama pembangunan ekonomi maupun efek ganda terhadap sektor lainnya. Hal tersebut tergambar secara umum pada karakteristik pertumbuhan ekonomi daerah karena karakteristik pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan apakah daerah tersebut maju dan tumbuh cepat, maju tapi tertekan, sedang tumbuh atau relatif tertinggal.

Pengukuran karakteristik pertumbuhan ekonomi sebagaimana dalam analisis *klassen typology*, diperoleh dari hasil perbandingan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita suatu daerah dengan daerah di atasnya, sehingga hubungannya sangat korelatif antara kemajuan sektor dengan tingkat pendapatan per kapita daerah sebagai ruang. Untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan ekonomi antara daerah di Provinsi Sulawesi Tengah terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2002-2006, ADHK 2000

Laju Pertumbuhan (r)	Pendapatan per Kapita (y)	
	yj > yn	yj < yn
rj > rn	Daerah Maju dan Tumbuh Cepat: 1. Kabupaten Marowali	Daerah Yang Sedang Tumbuh: 1. Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kabupaten Banggai 3. Kabupaten Toli-Toli 4. Kabupaten Buol
	(Daerah Satu)	(Daerah Tiga)
rj < rn	Daerah Maju Tapi Tertekan: 1. Kabupaten Parimo 2. Kota Palu	Daerah yang Relatif Tertinggal: 1. Kabupaten Poso 2. Kabupaten Donggala 3. Kabupaten Tojo Una-Una
	(Daerah Dua)	(Daerah Empat)

Sumber: BPS (diolah), 2002-2006

Tabel karakteristik pertumbuhan ekonomi antar daerah di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Morowali yang terkategori sebagai daerah maju dan tumbuh cepat karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol terkategori sebagai daerah yang sedang tumbuh karena keempat kabupaten tersebut pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibanding Provinsi Sulawesi Tengah, namun pendapatannya lebih rendah. Kabupaten Parimo dan Kota Palu terkategori sebagai daerah maju tapi tertekan karena pertumbuhannya lebih rendah, namun pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tojo Una-Una terkategori sebagai daerah yang relatif tertinggal karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Tengah.

Karakteristik pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, mengkonfirmasi bahwa pada umumnya daerah kabupaten masih membutuhkan suatu strategi pembangunan ekonomi yang terintegrasi. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan sektor basis maka sektor penunjang lainnya juga harus menjadi perhatian agar keterkaitan antar sektor dapat memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sehingga sektor-sektor basis dapat meningkatkan pendapatan per kapita serta dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang (*multiplier effect*).

### 3. Kedudukan *National Share* dan *Regional Share* Antar Daerah di Sulawesi Tengah.

Untuk mengetahui peranan kebasisan sektor ekonomi pada suatu daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita, maka selain menjadikan *klassen typology* sebagai rujukan, analisis *mix and share* juga dapat membantu dalam mengkonfirmasi peranan setiap sektor. Tingkat pertumbuhan dan kemampuan daya saing sektor ekonomi pada masing-masing daerah menunjukkan pertumbuhan ekonomi, ditentukan oleh *national share* atau *regional share*. Untuk mengetahui kedudukan *national share* dan *regional share* sektor ekonomi antar daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. *Analysis Mix and Share* Sektor Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, Periode Analisis 2002-2006, ADHK 2000

<i>Analysis Mix and Share per Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenga</i>			
Kabupaten	N	M	S
Kabupaten Banggai Kepulauan	25,185.40	1,158.11	108,756.71
Kabupaten Banggai	67,670.12	1,912.28	279,342.16
Kabupaten Morowali	51,134.44	-3848.35	318,626.21
Kabupaten Poso	39,998.30	-146.81	140,644.89
Kabupaten Donggala	114,372.80	2,598.46	447,830.66
Kabupaten Toli-Toli	46,767.45	551.58	180,508.13
Kabupaten Buol	22,563.91	783.05	92,570.13
Kabupaten Parimo	106,062.89	4,888.97	431,120.09
Kabupaten Tojo Una-Una	17,919.02	-216.43	62,121.55
Kota Palu	97,857.80	-15988.13	363,863.08

Sumber: BPS (diolah), 2002-2006

Berdasarkan *analysis mix and share*, menunjukkan bahwa seluruh daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah nilai *regional share* lebih besar dari *national share*, berarti setiap daerah kabupaten memiliki kemampuan *regional share* yang kuat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Besarnya nilai *regional share* terhadap nilai *national share* mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah-daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah tidak tergantung atau tidak ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

Kondisi pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota tersebut menjadi referensi bahwa rencana kebijakan pengembangan ekonomi Sulawesi Tengah mestinya memberi kewenangan yang besar dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di tingkat daerah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah provinsi, yang posisinya sebagai koordinator pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Tengah, terbatas pada upaya mendinamisasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi antar daerah agar dapat tumbuh dengan baik dengan iklim kompetisi antar daerah yang sehat berdasarkan potensi lokalitasnya masing-masing.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Potensi Ekonomi dengan Penentuan Sektor basis Antar Daerah di Sulawesi Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis LQ, sektor basis di sebagian besar kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sektor pertanian disusul sektor lain

- secara berurutan: sektor perdagangan restoran dan hotel, sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa.
2. Berdasarkan analisis DLQ, sektor basis yang tidak mengalami reposisi secara signifikan di sebagian besar kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.
  3. Berdasarkan analisis *klassen typology* daerah yang terkategoriisasi daerah maju dan tumbuh cepat adalah Kabupaten Morowali. Daerah yang sedang tumbuh adalah daerah: Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol. Daerah yang maju tapi tertekan adalah daerah: Kabupaten Parimo dan Kota Palu. Sedangkan, daerah yang terkategoriisasi sebagai daerah yang relatif tertinggal adalah daerah: Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tojo Una Una.
  4. Berdasarkan analisis *mix and share*, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah, nilai *regional sharenya* lebih besar dari *national share*

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan penentuan sektor basis antar daerah di Sulawesi Tengah, maka beberapa hal penting yang ingin disarankan:

1. Perencanaan pembangunan wilayah harus mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat/daerah berdasarkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kebijakan pembangunan ekonomi lebih fokus kepada sektor-sektor basis pada masing-masing daerah, sehingga tidak hanya menjadi keunggulan komparatif bagi daerah lainnya, tetapi menjadi keunggulan kompetitif untuk pangsa pasar (*market share*) yang lebih luas (nasional dan internasional).
2. Mengingat kontribusi sektor pertanian sangat besar bahkan menjadi sektor basis di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan di delapan kabupaten dan kota, maka mestinya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyusun strategi perencanaan pembangunan yang berbasis pada sektor pertanian dan terintegrasi dengan sektor penunjang lainnya. Hal mendesak harus diperhatikan adalah membangun infrastruktur pertanian di sembilan kabupaten, peningkatan sumber daya melalui lembaga penyuluhan, adopsi teknologi pertanian, penyediaan lembaga keuangan mikro untuk kredit usahatani.
3. Analisis *Mix and Share* menunjukkan bahwa semua daerah kabupaten pertumbuhan ekonominya tidak tergantung pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi tengah. Karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mendorong penguatan daerah-daerah kabupaten dengan desentralisasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam,

## AGRO EKONOMI

termasuk pengelolaan keuangan untuk pembiayaan sektor unggulan beserta daya penunjang lainnya.

4. Besarnya kontribusi sektor pertanian di sembilan kabupaten di Sulawesi Tengah, menjadi dasar utama pemerintah daerah untuk mengusahakan industri berbasis pertanian dengan pemetaan lebih valid subsektor-subsektor pertanian yang menjadi keunggulan setiap daerah.
5. Pemerintah provinsi harus dapat mengkoordinasikan perencanaan sektor yang menjadi unggulan pada beberapa daerah kabupaten untuk membangun basis produksi agar berdasarkan pertimbangan skala ekonomi investor tertarik untuk berinvestasi pada sektor pertanian.
6. Berdasarkan analisis LQ dan DLQ menunjukkan bahwa sektor pertanian dan sektor industri pengolahan sebagai sektor basis yang tidak mengalami reposisi di hampir semua daerah kabupaten. Pemerintah Sulawesi Tengah seharusnya dapat mendorong sektor industri pengolahan yang berbasis pada sektor pertanian dengan strategi perencanaan, membangun sentra industri pengolahan pada beberapa daerah strategis yang dapat mengakomodasi daerah kabupaten sekitarnya sebagai basis produksi hasil pertanian.
7. Kabupaten Donggala sebagai daerah kabupaten terdekat dari ibu kota provinsi yang juga berbasis pada sektor pertanian, sebaiknya daerah tersebut diarahkan sebagai daerah penyangga pemasok pangan dan penyedia bahan baku industri pengolahan pertanian di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L., 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
- , 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE.
- Aziz, I, J., 1994. *Ilmu ekonomi Regional Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: LPFE UI.
- Badan Pusat Statistik, 2002-2006. PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 2002-2006 (beberapa edisi penerbitan).
- , 2002-2006. PDRB Kabupaten Banggai 2002-2006 (dalam beberapa edisi penerbitan).
- , 2002-2006. PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan 2002-2006.
- , 2002-2006. PDRB Kabupaten Buol 2002-2006 (dalam beberapa edisi penerbitan).
- , 2002-2006. PDRB Kabupaten Donggala 2002-2006 (dalam beberapa edisi penerbitan).
- , 2002-2006. PDRB Kabupaten Morowali 2002-2006 (dalam beberapa edisi penerbitan).
- , 2002-2006. PDRB Kabupaten Parimo 2002-2006 (dalam beberapa edisi penerbitan).
- , 2002-2006. PDRB Kabupaten Poso 2002-2006 (dalam beberapa

## AGRO EKONOMI

edisi penerbitan).

-----, 2002-2006. PDRB Kabupaten Tojo Una Una 2002-2006.

-----, 2002-2006. PDRB Kabupaten Toli Toli 2002-2006 (dalam beberapa edisi penerbitan).

-----, 2002-2006. PDRB Kota Palu 2002-2006 (dalam beberapa edisi penerbitan).

Badan Pusat Statistik, 2005. Sulawesi Tengah dalam Angka 2005.

Suyatno, 2000. Analisis economic base terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tingkat II Wonogiri: menghadapi implementasi UU No. 22/1999 dan UU No 5/1999. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi*.